

**Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
(Menilik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)**

Daryono¹

Abstract

This research aimed at investigating the implementation of National Program for Independent Community Empowerment (PNPM Mandiri) to alleviate poverty in North Samarinda sub district. Out of eight villages in North Samarinda sub district, four were taken as the samples: Lempake, Sungai Siring, Tanah Merah and Budaya Pampang. Located in the suburban area, these villages were considered having higher poverty rate compared to the other four areas. Six criteria for evaluating public policy proposed by Dunn (2003) was used in this descriptive qualitative research. The criteria are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness.

Key words: National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri), poverty alleviation, small enterprise, community empowerment

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Mandiri dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara. Kecamatan Samarinda Utara memiliki delapan wilayah kelurahan, dari delapan wilayah yang ada, peneliti mengambil sampel 50% (empat wilayah kelurahan). Pengambilan sampel didasarkan pada angka kemiskinan yang tinggi pada masing-masing kelurahan. Wilayah yang terpilih adalah Kelurahan Lempake, Sungai Siring, Tanah Merah, Budaya Pampang. Keempat wilayah ini berada pada sub urban area. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif kualitatif, menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik; efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Dun (2003).

Kata Kunci : PNPM Mandiri, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian tentang kemiskinan selalu menjadi masalah aktual. Banyak lembaga atau organisasi maupun perseorangan tertarik meneliti tentang kemiskinan. Namun demikian tidak ada kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam memberikan solusi terhadap rumitnya masalah kemiskinan. Mengacu kepada Bank Dunia, bahwa orang dikatakan sangat miskin apabila biaya kehidupan mereka dibawah 1 Dollar AS dan dikatakan miskin jika pendapatan mereka dibawah 2 Dollar AS per hari. Apabila mengacu pada Bank Dunia tersebut, maka setengah dari penduduk dunia dalam kategori miskin. Bank Dunia dalam Maipita (2014:8) menyatakan, kemiskinan memiliki korelasi dengan tidak memiliki rumah, sakit, dan tidak

¹ Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda

memiliki uang untuk berobat ke dokter, tidak dapat pergi ke sekolah dan tidak dapat membaca dan menulis. Kemiskinan adalah tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki akses, tidak memiliki air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan tidak memiliki kebebasan.

Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan parameter bagi daerah-daerah lain di provinsi ini dalam segala hal; perkembangan atau perluasan kota, penataan ruang kota, penanganan masalah-masalah sosial perkotaan, maupun dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai daerah yang sedang membangun, kemiskinan merupakan masalah sosial yang cukup populer. Salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah tidak tepatnya kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam realisasinya justru dengan terbitnya kebijakan tersebut akan menambah angka kemiskinan yang ada. Sehingga ada anggapan bahwa kebijakan tersebut kurang tepat, salah sasaran, atau barangkali terjadi kesalahan dalam implementasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004:1-6) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Sharp et. al. Dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan,

keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004).

Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Menurut Friedrick 1968 (dalam Riant, 2004:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan-kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Kemudian menurut Riant (2004:57) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan; (2) kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang bisa disebut sebagai konvensi-konvensi.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki strategi yang jelas, idealnya mencakup empat hal berikut: (1) Kebijakan perluasan kesempatan (*promoting opportunity*), (2) Kebijakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), (3) Kebijakan peningkatan Kemampuan (*capacity building*), (4) Kebijakan perlindungan social (*social protection*).

Disamping mempunyai strategi yang jelas, sebuah kebijakan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: berpihak pada masyarakat miskin, didasarkan pada permintaan masyarakat miskin (*demand driver*), sebuah kebijakan dibuat bukan untuk dirahasiakan, akuntabilitas, *sustainable*, responsif, kompetensi, partisipatif, terpadu, target tepat sasaran, desentralistik, demokratis, kerjasama melalui jaringan, dan supremasi hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam melaksanakan

pekerjaan/konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kepemimpinan dan cara bertindak (dalam organisasi, pemerintahan).

Istilah kebijakan (*policy term*) menurut Jones (dalam Winarno, 2012:19) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Eyestone dalam Winarno (2012:20) mengatakan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang di tawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Oleh karena itu perlu penjelasan yang lebih spesifik lagi mengenai pengertian kebijakan. Berikut ini dapat dilihat definisi yang diajukan beberapa pakar tentang kebijakan publik. Dye dalam Ali dan Alam (2012:8) mengatakan bahwa “setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan”. Uraian demikian memberikan arahan berpikir bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki empat unsur, yaitu: (1) Adanya pernyataan kehendak. (2) Pernyataan didasarkan pada otoritas, (3) Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak, (4) Adanya tujuan yang dikehendaki.

Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186).

Anderson dalam Winarno (2012:230) membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Maka, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ketiga, merupakan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi

sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu: (1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, (2) Analisis terhadap masalah, (3) Deskripsi standarisasi kegiatan, (4) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang akan terjadi, (5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain, (6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn; Efektifitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.

Program Pengentasan Kemiskinan

Di wilayah Pemerintah Kota Samarinda, terdapat banyak program terkait pengentasan kemiskinan. Beberapa dinas mengeluarkan program untuk membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, memberikan solusi terkait kronisnya penyakit kemiskinan. Dari beberapa analisa bisa dipahami bahwa penyebab timbulnya kemiskinan dikarenakan banyak faktor, dan terkait hal ini telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Kemiskinan merupakan penyakit menahun bagi negara-negara berkembang, termasuk didalamnya Negara Indonesia. Tidak pernah ada angka yang pasti terkait jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Alih-alih mendapatkan angka yang pasti, proses untuk mendata angka kemiskinan sudah bermasalah dari awal. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat menyusun program yang terintegrasi dari berbagai *stakeholder* agar nantinya penanganan masalah kemiskinan juga terintegrasi dan dapat dikoordinasikan dengan baik. Dari sekian banyak program yang telah digulirkan dimasyarakat, kita mengenal program-program sebagai berikut :PNPM, Raskin, UMKM, Jamkesmas, Jamkesda, Teknologi Tepat Guna, Jampersal, Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Pemugaran

Rumah Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Desa, Program pemberdayaan Koperasi, Program Usaha Tani, Pemberdayaan Pelayanan Pendidikan

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Samarinda Utara. Kecamatan Samarinda Utara memiliki 8 wilayah kelurahan; Kel. Lempake, Kel. Tanah Merah, Kel. Sempaja Selatan, Kel. Sempaja Utara, Kel. Sungai Siring, Kel. Sempaja Timur, Kel. Sempaja Barat, dan Kel. Budaya pampang. Dari delapan kelurahan tersebut, terdapat beberapa wilayah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Daerah dimaksud adalah Kelurahan Lempake, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Sungai Siring Dan Kelurahan Pampang. Keempat kelurahan tersebut berada dalam daerah sub urban. Data primer berasal dari wawancara dengan para informan terkait dan hasil pengamatan langsung di situs penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki instansi terkait. Untuk mempertajam hasil dari penelitian ini maka peneliti memilih tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan setiap program yang ada. Diantaranya adalah, ketua program PNPM Mandiri, Lurah, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan pada masing-masing kelurahan. Sebagai data penyeimbang, peneliti juga menggali informasi dari masyarakat penerima program pengentasan kemiskinan.

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Fokus penelitian ini adalah; Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dengan sub-fokus penelitian yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Pembahasan

Efektifitas Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis memberi 3 indikator mengenai efektifitas kebijakan pengentasan kemiskinan, yaitu efektif dalam penyusunan program, efektif dalam menyediakan sumber daya manusia, dan efektif dalam pelaksanaan program. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), memiliki tiga unit program. Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL), Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan Unit Pengelolaan Sosial (UPS). Dari ketiga program ini dapat memenuhi kriteria pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. UPL, memiliki program yang jelas, terukur, menyentuh pada kebutuhan mendasar terkait perbaikan lingkungan fisik. Unit ini mampu menyerap dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Unit Pengelolaan Keuangan, memiliki visi misi untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat kecil dalam upaya mengembangkan daya kreasinya. Kedepan diharapkan program ini mampu melahirkan kelompok-kelompok usaha

dalam skala kecil namun memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan unit-unit usahanya. Kelompok-kelompok usaha kecil ini akan menjadi embrio dalam menciptakan bibit-bibit pengusaha papan atas. Unit Pengelolaan Sosial, unit ini memiliki program menjaring masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin. Implementasi dari program ini antara lain pemberian beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMU. Tentunya program ini sangat membantu masyarakat agar tidak putus sekolah.

Terkait dengan efektifitas dalam penyediaan Sumber Daya Manusia, PNPM Mandiri memiliki sisi lemah pada unit pengelolaan keuangan. Dalam unit ini tidak terdapat SDM yang memiliki kompetensi dalam pembinaan usaha yang dilakukan masyarakat. Yang mampu dikakukan baru pada tahap pemberian modal usaha, belum pada bagaimana cara membina kelompok usaha-kelompok usaha ini dapat berkembang dan bersaing dengan kompetitornya. Dengan tidak adanya sumber daya ini, maka sebenarnya merupakan hal yang sangat riskan terhadap kontinuitas program. Sehingga hal paling mendasar dalam unit ini adalah harus disediakannya sumber daya manusia yang cukup, yang mampu menjadi kekuatan dalam menjaga kontinuitas program.

Efisiensi dalam Pelaksanaan

Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan sub fokus efisiensi dalam pelaksanaan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut efisien dalam waktu, efisien dalam hal tenaga, dan efisien dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam efisiensi waktu dapat dipaparkan bahwa program pengentasan kemiskinan memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam identifikasi masalah kemiskinan, jenis kemiskinan yang ada, pola penanganan yang akan dilaksanakan, tahapan dalam penanganan dan lain sebagainya.

Realita yang ditemukan dilapangan, bahwa program PNPM Mandiri digulirkan mulai tahun 2007 sampai dengan 2014. Jika menilik pada rentang waktu yang ada, pada hakekatnya program ini sangat berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Mengapa demikian, karena program ini mampu memberikan reaksi yang cepat terhadap permasalahan sosial yang diahapi kaum lemah. Dari sisi waktu sangat efisien, hanya saja yang sangat disayangkan adalah program ini tidak berlanjut pada tahun 2015. Ada program pengganti yang digagas oleh pemerintah saat ini, namun tidak sekomprensip program PNPM Mandiri, karena program pengganti hanya mengacu pada pembangunan fisik lingkungan, tanpa mengandung unsur pemberdayaan. Dalam hal pembiayaan juga sangat efisien karena untuk pengelolaan keuangan terdapat penyederhanaan birokrasi. Dana program ini berasal dari APBN yang dikucurkan langsung kepada pengelola ditingkat kelurahan. Dengan birokrasi yang pendek ini tentunya akan dapat mempercepat proses realisasi program kegiatan PNPM mandiri. Kecepatan gerak program dan ketepatan sasaran akan berpengaruh besar terhadap

keberhasilan pelaksanaan program. Dan ini terdapat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Kecukupan terhadap kebutuhan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memiliki dalam hal volume program. Volume yang dimaksudkan disini adalah jumlah dana yang tersedia. Kuantitas dana untuk Unit Pengelola Lingkungan, merupakan suntikan dana yang sifatnya bantuan untuk program skala kecil, misalnya pembuatan gorong-gorong, parit, jalan dengan diameter tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana untuk UPL ini hanya sebagai dana pendamping atau stimulan. Selebihnya masyarakat melakukan swadaya atau bisa jadi meminta sumber dana dari instansi terkait. Begitu juga dengan dua unit yang lain; UPK dan UPS. Dengan demikian pada hakekatnya akan lebih efisien kalau jumlah dana yang dialokasikan dalam program ini bisa ditingkatkan. Terkait evaluasi kecukupan terhadap terhadap kebutuhan masyarakat, maka terjadi inefisiensi program.

Perataan dalam pelaksanaan Kebijakan

Pemerataan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan menjadi hal yang sangat penting. Pengelola PNPM Mandiri harus memiliki data yang akurat yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Ada dilema yang terjadi dilapangan, yaitu terkait penentuan jumlah warga miskin disetiap daerah. Dalam proses identifikasi warga miskin yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, selalu menimbulkan konflik internal dalam masyarakat. Data yang dilahirkan BPS tidak bisa dijadikan acuan bagi pengelola PBPM dikarenakan keakuratan data sangat diragukan. Banyak faktor yang menyebabkan data BPS tidak dapat dipakai, diantaranya adalah proses pendataan yang tidak maksimal, tidak adanya koordinasi dengan pihak kelurahan (bagian kesra, RT dll).

Dengan kondisi itu maka PNPM mengambil langkah yang sangat kreatif, yaitu mencoba idntifikasi ulang masyarakat miskin yang ada di wilayahnya. Dari langkah ini PNPM mendapatkan data yang lebih akurat dibandingkan data BPS. Dalam proses pendataan, PNPM melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga PNPM memiliki tingkat kontrol yang tinggi dalam implementasi program nantinya.

Terkait dengan pemerataan program PNPM, harus disampaikan dengan obyektif bahwa program ini memiliki sisi lemah dalam hal kuantitas dana yang tersedia dan sumber daya pengelola yang juga memiliki keterbatasan. Namun demikian orientasi pemerataan menjadi prioritas program ini. Perbedaan program PNPM dengan yang lain adalah dalam penentuan prioritas program. PNPM justru sangat akomodatif, karena program yang dijalankan merupakan himpunan dan kumpulan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Terkait dengan pemerataan maka dapat dipastikan terjadi pemerataan dalam pelaksanaan program.

Responsivitas

Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan obyek dari program, apakah mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mampu meningkatkan aset dan akses masyarakat miskin, mampu meningkatkan daya kemandirian masyarakat dan lain-lain.

Pada tahap evaluasi ini maka unsur yang paling penting adalah *feedback* dari penerima program. Pernyataan, sikap dan perilaku penerima program merupakan cerminan dari responsivitas. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebuah gagasan yang diciptakan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bermula dari pembenahan lingkungan fisik, pemberdayaan dan penggalan potensi masyarakat sampai kepada penanganan masalah sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Melihat pada paparan tersebut maka pada dasarnya apa yang menjadi program PNPM adalah apa yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat. Disini terlihat responsivitas. Di Kecamatan Samarinda Utara (baca Kelurahan Lempake, Kel. Sungai Siring, Kelurahan Tanah Merah dan Kel. Pampang), mendapat respon yang sangat positif. PNPM Mandiri menjadi pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ketepatan Program

Kebijakan dibuat tentunya dengan tujuan yang jelas, kriteria yang jelas, batasan yang jelas, dan tahapan yang jelas guna mencapai target. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) memiliki transparansi manajemen. Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (Actuating), dan Evaluasi (Evaluating) ada dalam program ini. Dengan adanya fungsi manajemen yang sempurna maka ketepatan program akan dapat dicapai. Obyek dari tahapan evaluasi ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program. Unsur kemanfaatan perlu dilihat, dianalisa dan dikaji dengan baik. Dengan mengacu pada tiga unit yang dimiliki PNPM Mandiri, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini dibuktikan oleh dampak, manfaat, responsivitas dari lingkungan dan peserta program yang secara langsung menerima dari PNPM Mandiri.

Kesimpulan

Dari evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara dapat dikatakan bahwa pada saat ini kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan lebih dominan manfaatnya dibandingkan dengan program pengentasan kemiskinan yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Efektifitas kebijakan, dari tiga unit program yang

diluncurkan, terdapat satu unit yang memiliki sisi lemah yaitu pada indikator penyediaan sumber daya manusia untuk unit pengelola keuangan. Efisiensi kebijakan, usaha pencapaian tujuan dapat dikatakan cukup efisien. Kecukupan kebijakan. Pada tahapan evaluasi ini yang terjadi adalah inefisiensi kebijakan. Hal ini terjadi bukan dikarenakan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan program, namun lebih pada kuantitas kucuran dana yang ada belum mampu memenuhi kuantitas keperluan di lapangan. Perataan kebijakan, dalam pelaksanaan programnya PNPM sangat memperhatikan pemerataan, proses awal melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, konsep *bottom up* merupakan ciri utama PNPM Mandiri. Responsivitas Kebijakan. Pada tahapan evaluasi ini, ada beberapa catatan penting. Dari ketiga unit pelaksana yang ada, UPK dan UPS merupakan program yang memiliki responsivitas yang tinggi. Ketepatan kebijakan. PNPM Mandiri merupakan program pengentasan kemiskinan yang sangat akurat ketepatan programnya. Karena memiliki tiga ciri utama yaitu birokrasi yang singkat dan sederhana, respon yang cepat serta konsep *bottom up*.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : Unit Pelaksana Keuangan memiliki program pemberdayaan tentang pengembangam UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kelemahan yang ada dalam program ini adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang UMKM. Saran yang kami berikan antara lain: PNPM Mandiri dapat bekerjasama dengan Tim Pembina UMKM Kota Samarinda dan Dinas Koperasi Kota Samarinda. Kedua instansi ini memiliki komptensi dalam bidang UMKM. Kecukupan program. Mengingat unsur kemanfaatan yang tinggi dari PNPM mandiri, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk meneruskan program ini pada tahun-tahun berikutnya, dan menambah kuantitas dana yang akan dianggarkan untuk PNPM, minimal penambahan anggaran tersebut 30% dari dana yang sudah digulirkan. Diperlukan anggaran untuk honorarium tim pengelola, karena selama ini pengelola tidak mendapatkan gaji atas kinerjanya dalam pengelolaan program ini. Pemerataan program. Secara kualitas memang terjadi pemerataan program, namun untuk kuantitas masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan dana dari APBN. Pengembangan program dari masing-masing unit pengelola. Untuk unit pengelola lingkungan dikurangi persentasenya, untuk dialihkan pada unit pengelola keuangan dan sosial. Pengembangan akses untuk unit pengelola keuangan harus dikembangkan, langkahnya antara lain adalah membuka kerjasama dengan perbankan dalam kerapiian manajemen keuangan serta membuka kerjasama dengan unit-unit ekonomi yang ada disekitar wilayah mereka. Misalnya indomaret, alfamidhi, hero dan lain-lain. Hal ini untuk mempermudah akses PNPM dalam pengembangan UMKM yang menjadi binaan mereka.

Daftar Pustaka

Anonim, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

_____, *WorldBank Development Report 2000/2001:AttackingPoverty.* Oxford University Press Boston.2001

Buku Data Monografi Kelurahan Lempake 2014.

Buku Data Monografi Kelurahan Tanah Merah 2014.

Buku Data Monografi Kelurahan Sungai Siring 2014.

Buku Data Monografi Kelurahan Budaya Pampang 2014.

Cox, David. 2004. "*Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia Pacific Region.*" Makalah disampaikan pada *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia.* Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.

Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik.* Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama.

Leo, Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik.*

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2004. *Analisis Data Kualitatif.* Penerbit UI-Press. Jakarta.

Moeleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda karya.

Sahdan, Gregorius. 2005. "*Menanggulangi Kemiskinan Desa*" *Jurnal Ekonomi Rakyat.* Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005.

Steers, R, M., 1985, *Efektivitas Organisasi,* Cetakan II, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.